

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cet. 13. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*.
- . *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Semu dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media/Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- OECD. *OECD Reviews of Regulatory Reform: Indonesia*. Paris: OECD Publishing, 2012.
- Sinclair, Barbara. *Unorthodox Lawmaking: New Legislative Processes in the U.S. Congress*. 5th ed. Washington, DC: CQ Press, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- . *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- . *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.

JURNAL

- Absor, Muhammad Ulil, dan M. Zaki Mubarrak. "Legislation Productivity of Legislative Institution in Indonesia." *LEGAL Journal* 13, no. 2 (2024).
- Fadillah, Nor. "Analisis Yuridis Asas Keterbukaan dalam Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja." *Lex Renaissance* 7, no. 2 (2022).
- . "Analisis Yuridis Asas Keterbukaan dalam Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Ibu Kota Negara." *Lex Renaissance* 7, no. 2 (2022): 243–264.
- Gardbaum, Stephen. "Due Process of Lawmaking Revisited." *University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law* 21, no. 1 (2018).
- Gluck, Abbe R. "Unorthodox Lawmaking, Unorthodox Rulemaking." *Columbia Law Review* 115, no. 7 (2015).
- Hasibuan, M. "Evaluasi Implementasi Periode *Lame Duck* di Indonesia." *Jurnal Edukasi* (2023).
- Mochtar, Zainal Arifin. "Komisi Pemberantasan Korupsi dan Problem Legislasi di Masa Transisi." *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2020).
- Nagle, John Copeland. "Lame Duck Logic." *UC Davis Law Review* 45 (2012): 1177–1246.
- O'Connell, Anne Joseph. "Political Cycles of Rulemaking." *Virginia Law Review* 94 (2008): 889–953.
- Prasojo, H., dkk. "Inovasi Kolaboratif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 1 (2022).
- Prastyo, Angga. "Batasan Prasyarat Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 3 (2022): 405–436.
- Priyudha, F. Y., dkk. "Peran Aktor Politik: Revisi UU KPK 2019 Terhadap Demokrasi Indonesia." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 27, no. 1 (2025): 35-38.
- Raihan, Muhammad. "The Urgency of the Regulation of Legislative Power During the *Lame Duck* Session in Indonesia Post-2024 Election." *Journal of Contemporary Government and Society (UII)* 3, no. 1 (2024).
- Saputra, Imran Eka, dan Ali Rahman. "Reformasi Sistem Perundang-Undangan Indonesia: Strategi Pembentukan Lembaga Independen untuk Menangani Hiper-Regulasi." *JAPHTN-HAN* 3, no. 1 (2024): 69–88.
- Sujana, I Gede. "Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 1 (2024): 7–13.

- Ulaa, Oksalin Girysvia. “Fungsi Legislasi Dalam Periode *Lame Duck Session* Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” *Lex Privatum* 13, no. 4 (2024).
- Utama, Anang Puji. “Hubungan Kualitas Peraturan Perundang-undangan dengan Pembangunan Karakter Bangsa dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg).” *Jurnal Pendidikan Indonesia* 5, no. 12 (2024): 1709–1713.
- Zulfahmi, M., dan R. D. Agustanti. “Cacat Mekanisme Pelaksanaan Revisi UU KPK 2019 dan Perbandingan Substansi serta Dampak Terhadap Kinerja KPK.” *Jurnal Perahu (Penerangan Hukum)* 12, no. 1 (2024): 140.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 667.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

PUTUSAN PENGADILAN

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diputus 4 Mei 2021.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Diputus 25 November 2021.

SKRIPSI

Nurradian, N. "Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Masa Transisi *Lame Duck Session* Perspektif Masalah Mursalah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.

Sulistriani. "Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Masa *Lame Duck Session* pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Positif dan Siyasah Dusturiyah." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2024.

LAPORAN, SUMBER RESMI, DAN MEDIA DARING

BEM Universitas Diponegoro. "Upaya Pelemahan dan Catatan Permasalahan KPK Bidang Sosial dan Politik." *Kajian BEM Undip*. 2021. <https://bem.undip.ac.id/wp-content/uploads/2021/08/BEM-UNDIP-KAJIAN-KPK.pdf>.

DetikNews. "Superkilat, Ini Kronologi 13 Hari DPR-Jokowi Revisi UU KPK." 17 September 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4709596/superkilat-ini-kronologi-13-hari-dpr-jokowi-revisi-uu-kpk>.

Doloksaribu, Nathaniel, dan Christian Dior P.S. "Selayang Pandang: Revisi UU KPK." *Badan Diklat Kejaksaan RI*. 25 September 2019. <https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/selayang-pandang-revisi-uu-kpk-bc95f>.

Hudiburg, Jane A. "Lame Duck Sessions of Congress, 1935–2022 (74th–117th Congresses)." *Congressional Research Service*, rev. 2024.

Hukumonline. "Apakah Praktik Lame Duck Session Dikenal di Parlemen Indonesia?" 31 Agustus 2021.

Indrayana, Denny. "Menanti Masa 'Transisi' dalam Aktivitas Legislasi." *detikNews*, 20 Februari 2024.